

Bandung, 26 Mei 2025

# RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

Disampaikan Oleh:

**Dedi Mulyadi, S.STP, M.Si.**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Barat

Pada Acara Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Sumedang

# PENYUSUNAN RPJMD 2025-2029

## DASAR HUKUM RPJMD

- RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

(Pasal 14 UU Nomor 25 Tahun 2004)

## PELANTIKAN KEPALA DAERAH TERPILIH

- KPU telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU Jabar Nomor 3 Tahun 2025 serta ditetapkan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Januari 2025
- Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025

## DOKUMEN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2029

- Penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah
- Disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN
- Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik

# 1 | GAMBARAN UMUM JAWA BARAT



# GAMBARAN UMUM



## 50,34 JUTA JIWA

PENDUDUK JAWA BARAT

51 JUTA

Korea Selatan

27 JUTA

Australia

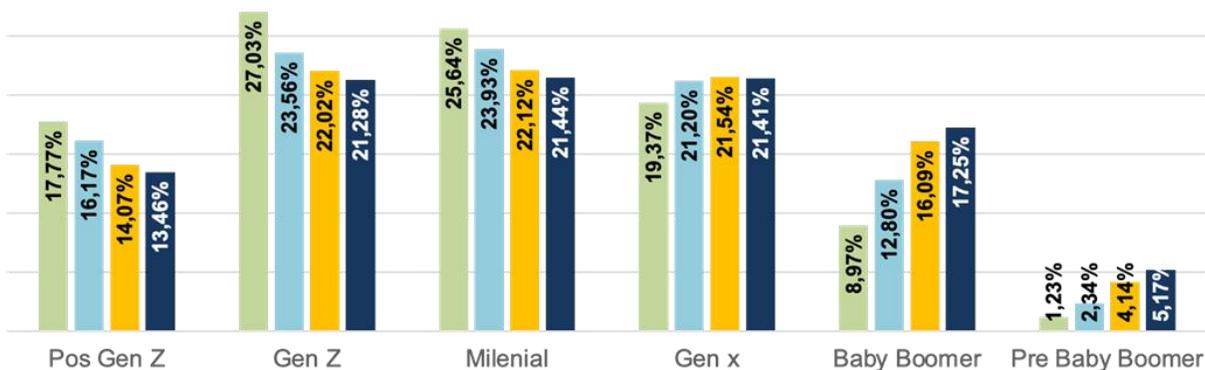
35 JUTA

Arab Saudi

34 JUTA

Malaysia

	2020	2030	2040	2045
Nasional	269,15 Juta Jiwa	297,43 Juta Jiwa	317,22 Juta Jiwa	324,05 Juta Jiwa
Jawa Barat	45,15 Juta Jiwa	52,69 Juta Jiwa	55,83 Juta Jiwa	56,80 Juta Jiwa



## 2024



IPM 74,92 (Peringkat 10 Nasional)



RLS: 8,87 Tahun  
HLS: 12,80 Tahun



UHM: 75,16 Tahun



PDRB Perkapita:  
12, 57 Juta/Tahun



KEMISKINAN 7,08% (Peringkat 24 Nasional)



Perkotaan:  
6,65%



Perdesaan:  
8,85%



PENGANGGURAN 6,75% (Peringkat 1 Nasional)



Perkotaan:  
6,98%



Perdesaan:  
5,84%

### TANTANGAN PENDUDUK 2045



Komposisi penduduk usia lanjut meningkat sekitar 3 kali lipat - Dependency Ratio meningkat

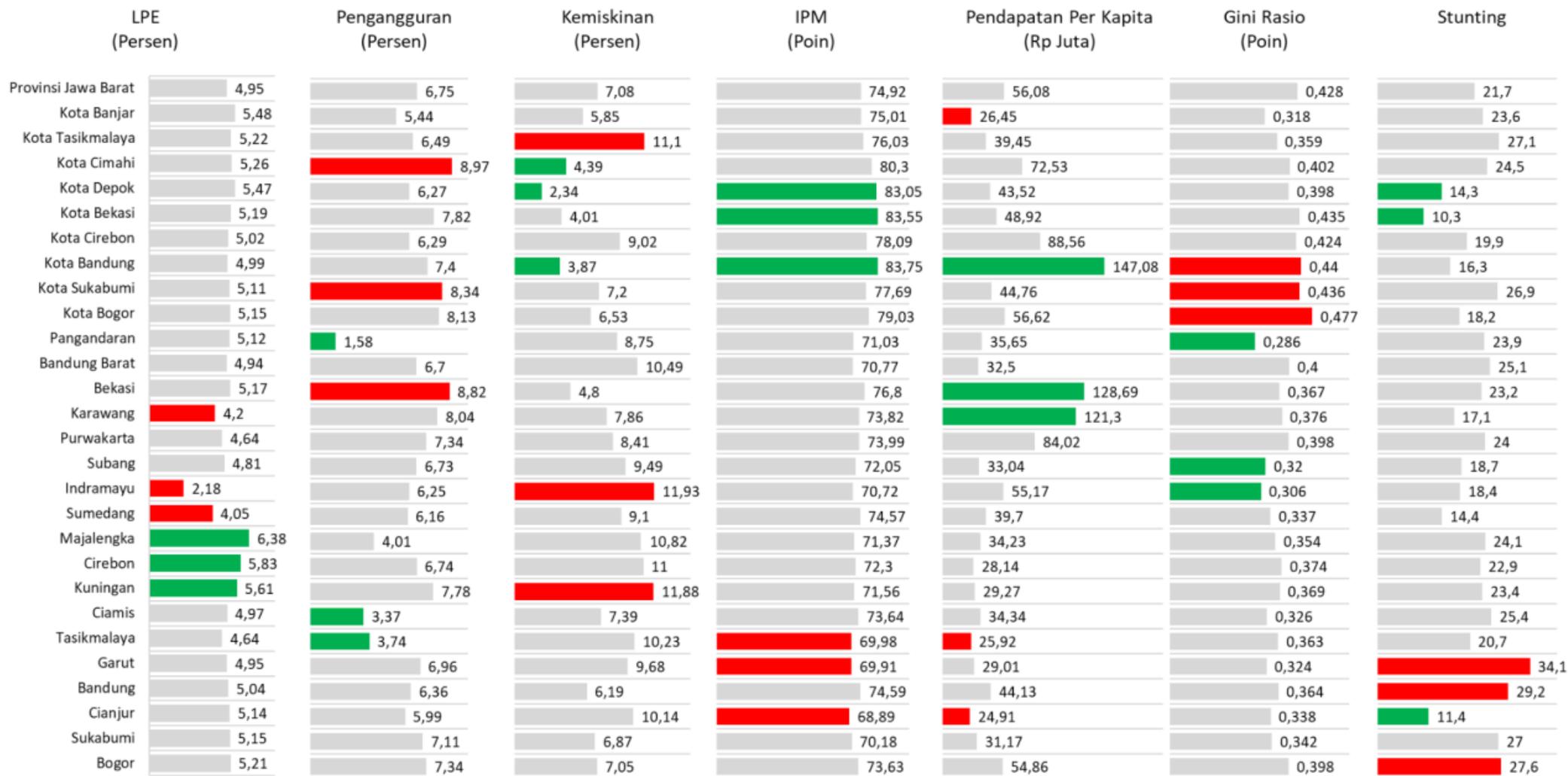
- Menurunnya angka kelahiran di Jawa Barat di tahun 2045
- Meningkatnya angka kematian total di Jawa Barat di tahun 2045,
- Migrasi Keluar dari Jawa Barat akan lebih besar dari pada migrasi masuk Jawa Barat

Kualitas Sumber Daya Manusia

Pelayanan Untuk Usia Lanjut Usia

Persiapan SDM Usia Produktif yang siap bersaing

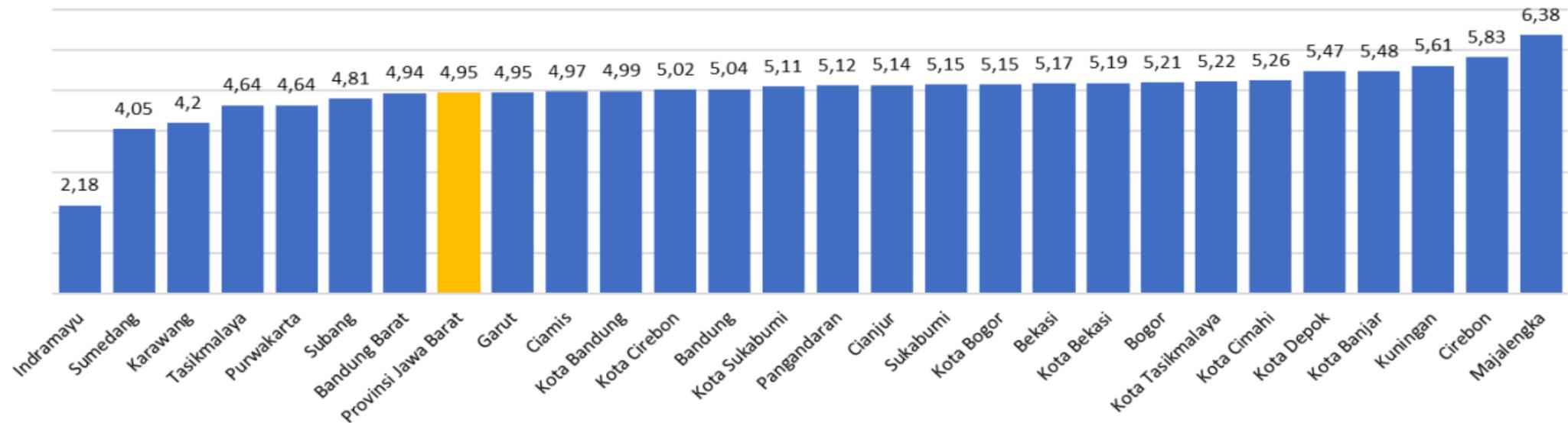
# KINERJA INDIKATOR MAKRO KABUPATEN KOTA 2024



# LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

- Pada tahun 2024, PDRB harga berlaku Jawa Barat mencapai Rp2.823 triliun, berkontribusi 12,8% terhadap PDB nasional, tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta (16,7%) dan Jawa Timur (14,4%).
- Secara harga konstan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 4,95%, menempati posisi ke-16 secara nasional, namun masih menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa setelah DI Yogyakarta (5,03%).
- Pertumbuhan ini dinilai resilien, namun perlu disertai dengan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan pemerataan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
- Sebanyak 20 Kabupaten/Kota di Jawa Barat mencatat pertumbuhan di atas rata-rata provinsi. Kabupaten Majalengka mencatat pertumbuhan tertinggi (6,38%), sementara Kabupaten Indramayu terendah (2,18%), menurun tajam dari 9,76% pada 2023 akibat melambatnya sektor pengolahan migas.

## LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

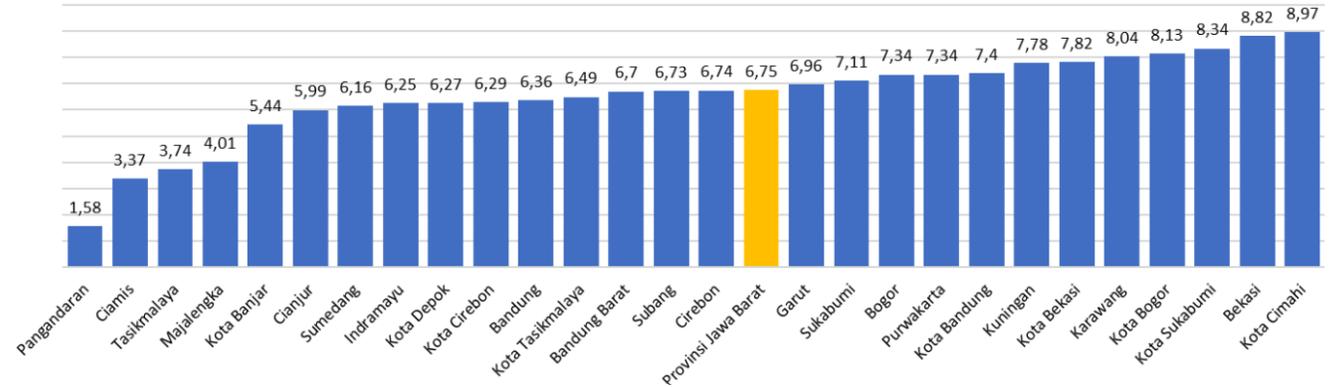


# TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

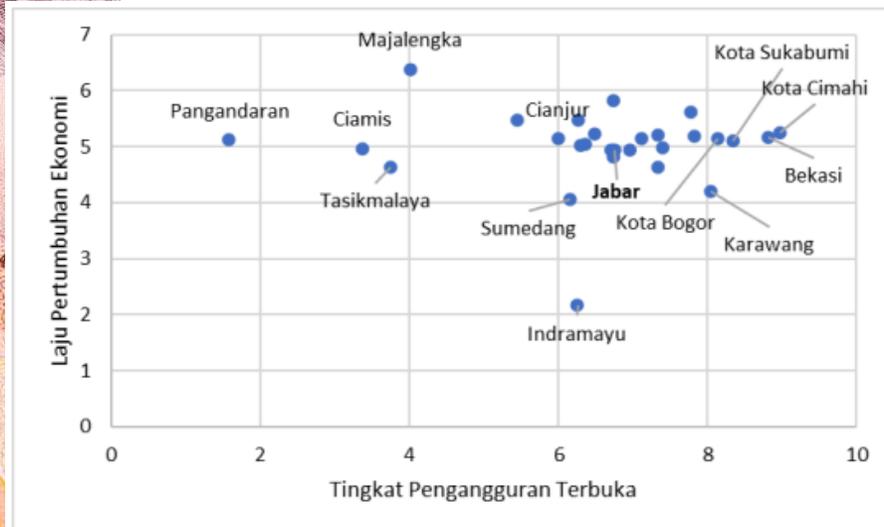
Pada Agustus 2024, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 50,3 juta jiwa, dengan 38,67 juta di antaranya merupakan penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,7 persen menunjukkan adanya 26,2 juta orang dalam angkatan kerja, meningkat 1,2 poin dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta orang menganggur, menghasilkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,75 persen.

TPT antar daerah di Jawa Barat bervariasi, dengan angka terendah di Kabupaten Pangandaran (1,58 persen) dan tertinggi di Kota Cimahi (8,97 persen). Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka juga mencatat TPT relatif rendah, masing-masing sebesar 3,37 persen, 3,74 persen, dan 4,01 persen. Hal ini mencerminkan masih adanya ketimpangan dalam distribusi kesempatan kerja di berbagai wilayah.

## TPT KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT AGUSTUS 2024



## SANDINGAN TPT DENGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI



Perbandingan antara Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk menilai kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan pengangguran di Jawa Barat. Pada tahun 2024, TPT Jawa Barat tercatat sebesar 6,74 persen, tertinggi ketiga secara nasional setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Papua. Dengan jumlah angkatan kerja yang besar, Jawa Barat juga mencatat jumlah pengangguran terbanyak secara absolut, yaitu sekitar 1,8 juta orang, yang mencerminkan adanya potensi pertumbuhan ekonomi yang hilang.

Secara umum, distribusi data menunjukkan pola berbanding terbalik antara LPE dan TPT, yaitu semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka pengangguran cenderung menurun. Namun, terdapat beberapa daerah yang menyimpang dari pola tersebut, yakni memiliki LPE tinggi tetapi TPT juga tinggi, yang mengindikasikan perlunya intervensi untuk meningkatkan inklusi ekonomi. Daerah-daerah tersebut antara lain adalah Kabupaten Bekasi, Karawang, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Kota Bogor.



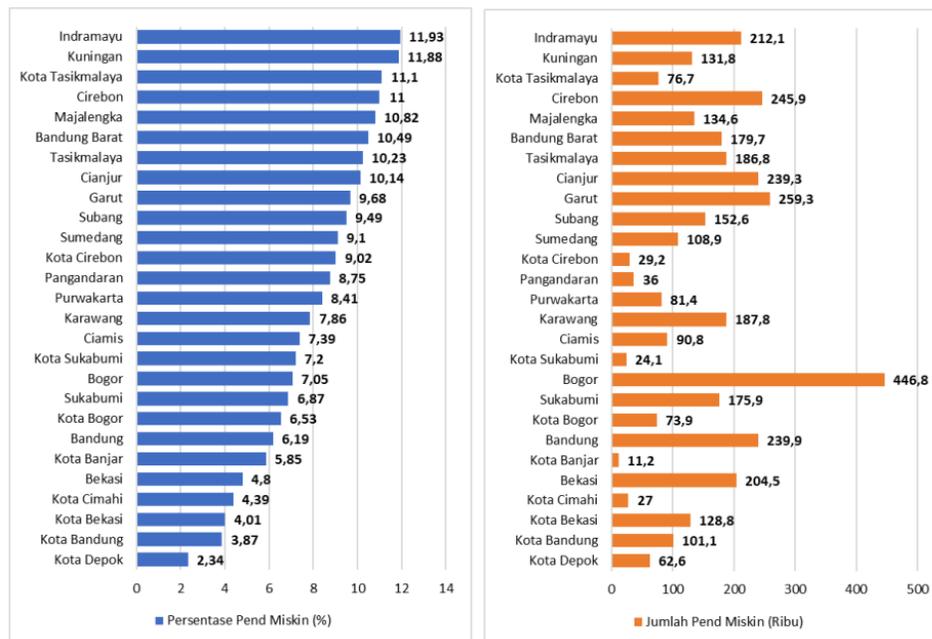
# TINGKAT KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan dihitung sebagai persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk, berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar atau *Cost of Basic Needs* (CBN). Garis kemiskinan mencakup kebutuhan makanan (minimal 2.100 kilokalori per orang per hari) dan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

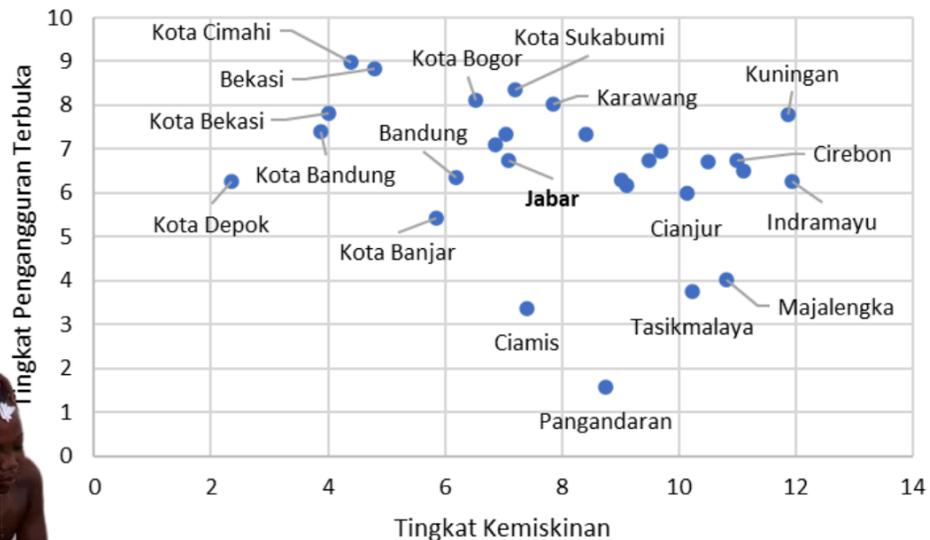
Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp595.242 per bulan, atau sekitar Rp2.803.590 per rumah tangga (dengan rata-rata 4,71 anggota). Di Jawa Barat, garis kemiskinan sedikit lebih rendah, yaitu Rp532.551 per kapita, atau Rp2.439.083 per rumah tangga (dengan rata-rata 4,58 anggota).

Tingkat kemiskinan di Jawa Barat mencapai 7,08 persen, setara dengan 3,7 juta orang atau 785.562 keluarga. Secara persentase, kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Indramayu (11,93%), Kuningan (11,88%), dan Kota Tasikmalaya (11,1%). Sementara itu, jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, yang tertinggi adalah Kabupaten Bogor (446 ribu orang), diikuti oleh Garut (259 ribu) dan Cirebon (245 ribu).

## PERSENTASE DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN KOTA 2024



## SANDINGAN TPT DENGAN TINGKAT KEMISKINAN



Perbandingan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka memberikan gambaran lebih dalam mengenai akses masyarakat terhadap penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasar. Menariknya, sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Banjar menunjukkan TPT tinggi namun tingkat kemiskinannya rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya resiliensi ekonomi, yang kemungkinan didukung oleh jaring pengaman sosial yang kuat serta adanya sumber pendapatan non-pekerjaan, seperti bantuan keluarga atau penghasilan pasif.

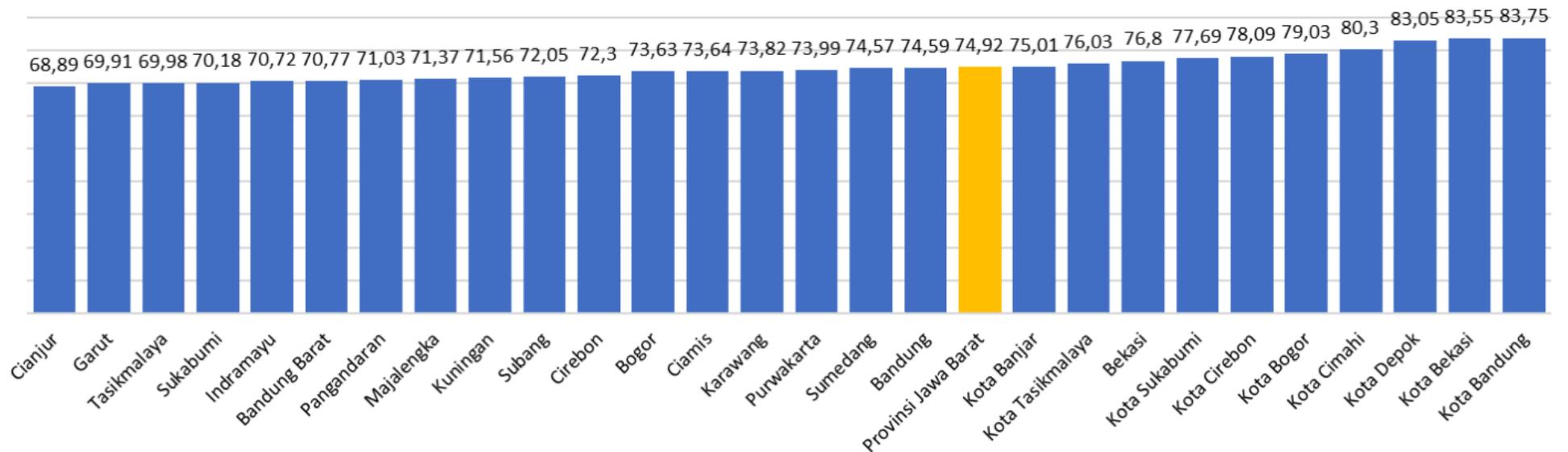
Sebaliknya, terdapat dua kelompok daerah yang perlu menjadi perhatian. Pertama, daerah dengan pengangguran dan kemiskinan tinggi seperti Kabupaten Kuningan, Karawang, dan Bandung Barat, yang memerlukan intervensi penciptaan lapangan kerja. Kedua, daerah dengan pengangguran rendah tetapi kemiskinan tinggi seperti Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Majalengka, Indramayu, dan Cianjur, yang memerlukan peningkatan kualitas pekerjaan dan produktivitas agar pendapatan masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidup layak.



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat 2024 sebesar 74,92 poin. Di tingkat Kabupaten Kota, capaian IPM tertinggi didominasi oleh daerah perkotaan, utamanya Kota Bandung (83,75), Kota Bekasi (83,55), dan Kota Depok (83,05). Sementara itu capaian terendah didominasi daerah di Jabar Selatan, yaitu Kabupaten Cianjur (68,89), Garut (69,91), dan Tasikmalaya (69,98). Capaian IPM di tingkat Kabupaten Kota cenderung lebih rendah dari Jawa Barat, terhitung sebanyak 17 Kabupaten memiliki IPM di bawah rata-rata Jawa Barat. Pemerataan pembangunan ke Jabar Selatan, peningkatan kualitas layanan dasar, dan investasi pada potensi lokal diharapkan dapat meningkatkan IPM di Jabar Selatan.

## CAPAIAN IPM KABUPATEN KOTA 2024

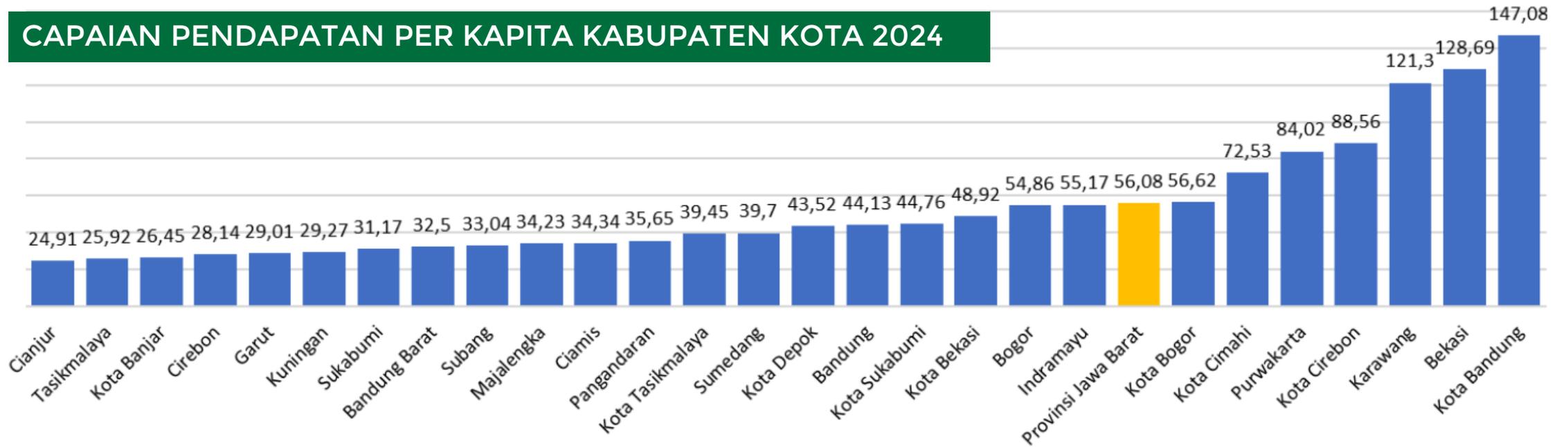


# PENDAPATAN PER KAPITA

Pendapatan per Kapita Jawa Barat 2024 sebesar Rp56,08 juta. Di tingkat Kabupaten Kota, pendapatan per kapita tertinggi didominasi oleh daerah perkotaan dan industri, utamanya di Kota Bandung (Rp147 juta), Kabupaten Bekasi (Rp128 juta), dan Kabupaten Karawang (Rp121 juta). Ketiga daerah ini memiliki PDRB per Kapita yang sangat signifikan tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Kota Bandung hampir setara dengan enam kali lipat pendapatan per kapita Kabupaten Cianjur, dan lebih dari dua kali lipat rata-rata Jawa Barat.

Sementara itu capaian terendah didominasi daerah di Jabar Selatan, yaitu Kabupaten Cianjur (Rp24,9 juta), Kabupaten Tasikmalaya (Rp25,9 juta), dan Kota Banjar (Rp26,45 juta). Ketimpangan pendapatan per kapita ini juga terlihat dari jumlah kabupaten kota yang berada di bawah rata-rata Jawa Barat, yaitu sebanyak 20 kabupaten kota memiliki pendapatan per kapita di bawah Jawa Barat.

## CAPAIAN PENDAPATAN PER KAPITA KABUPATEN KOTA 2024

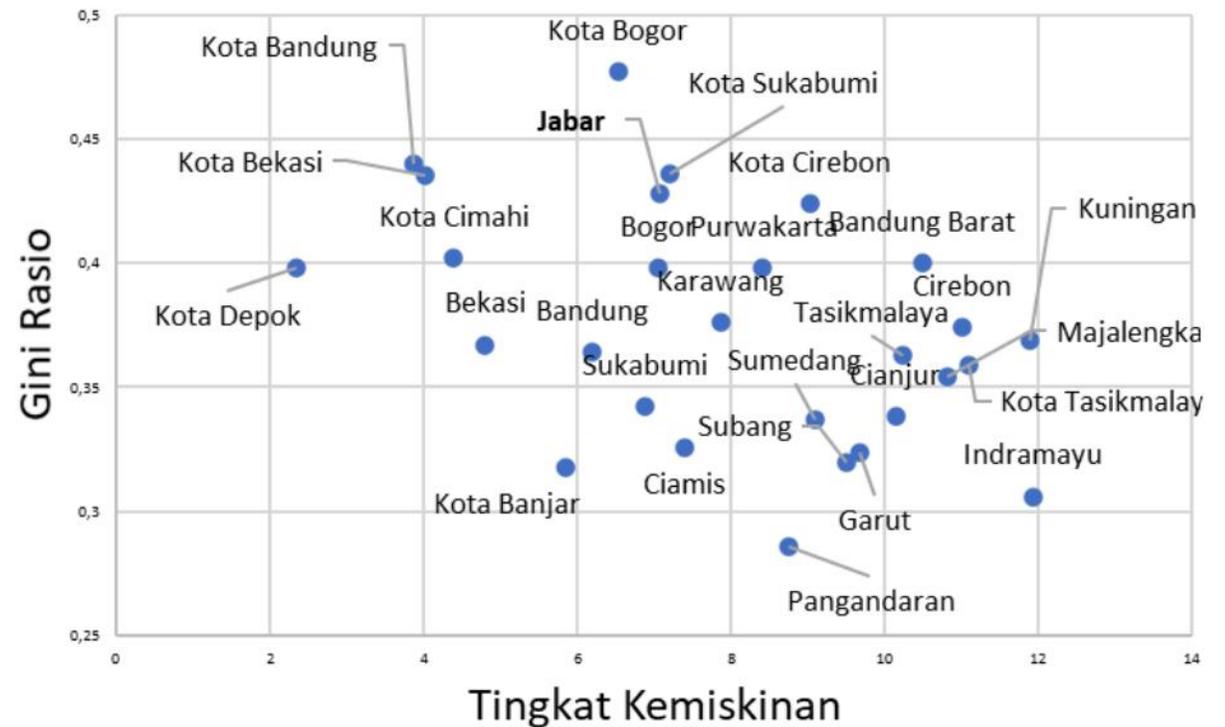


# GINI RASIO

Gini Rasio Jawa Barat adalah yang tertinggi di Indonesia, mencapai 0,428 di tahun 2024. Meskipun demikian, gini rasio bersifat lokal, artinya gini rasio antar daerah tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena akan terjadi bias pembangunan. Gini rasio dapat menunjukkan ketimpangan yang rendah ketika melihat suatu daerah yang merata kaya, dan juga daerah lain yang merata miskin. Oleh karena itu, pendekatan analisis gini rasio harus dilihat secara lokal.

Berdasarkan grafik di bawah, gini rasio yang rendah di Kabupaten Indramayu, Pangandaran, Garut, Subang, Majalengka, Cianjur, Tasikmalaya, Kuningan, Sumedang, dan Cirebon, terindikasi merata miskin, karena persentase kemiskinan yang masih tergolong tinggi di atas Jawa Barat. Sementara itu, gini rasio di daerah perkotaan cenderung tinggi tetapi diikuti oleh tingkat kemiskinan yang rendah, sehingga terindikasi adanya perbedaan pengeluaran yang sangat signifikan antar kelompok, mengingat jenis, sektor, dan posisi pekerjaan yang sangat beragam di perkotaan.

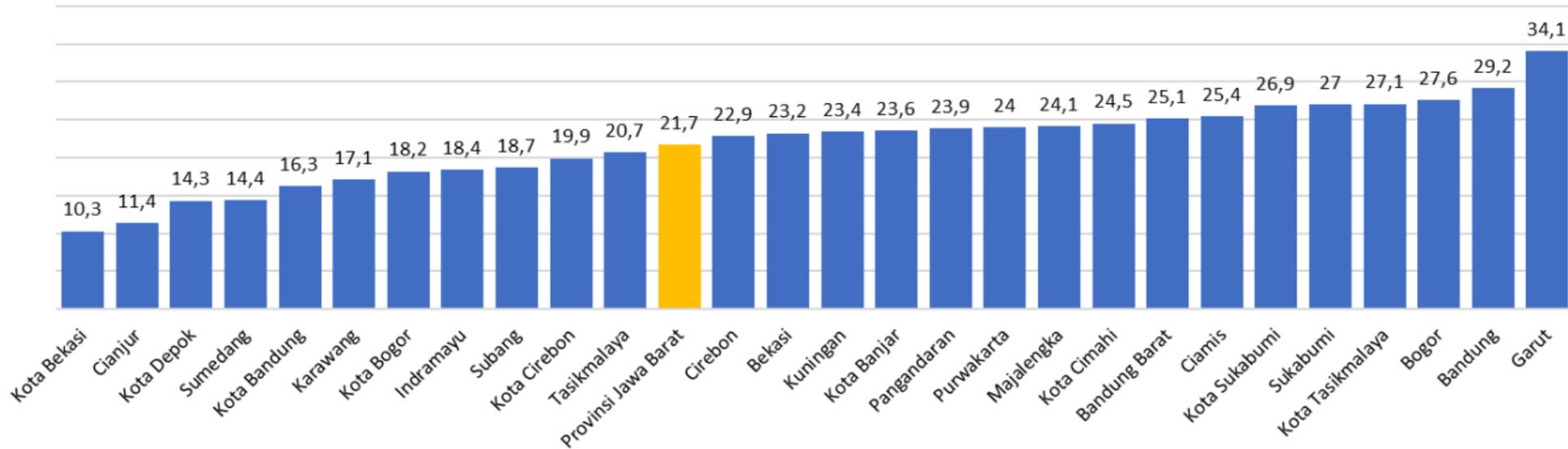
## SANDINGAN GINI RASIO DAN KEMISKINAN KABUPATEN KOTA TAHUN 2024



# STUNTING

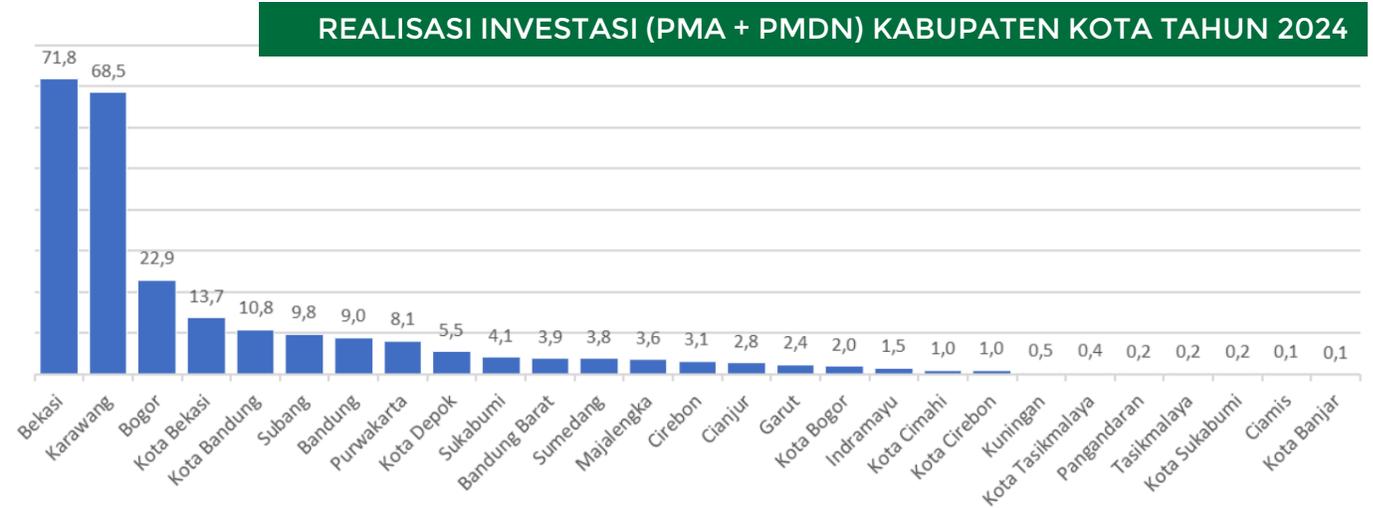
Berdasarkan data prevalensi stunting di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antarwilayah. Kota Bekasi mencatat prevalensi stunting terendah sebesar 10,3%, sementara Kabupaten Garut menempati posisi tertinggi dengan angka 34,1%. Rata-rata prevalensi stunting di tingkat provinsi berada pada angka 21,7%. Sebanyak 11 kabupaten/kota memiliki prevalensi di bawah rata-rata provinsi, di antaranya Kota Bekasi, Cianjur, Kota Depok, Sumedang, Kota Bandung, Karawang, Kota Bogor, Indramayu, Subang, Kota Cirebon, dan Tasikmalaya. Ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut relatif berhasil dalam pengendalian stunting, meskipun tetap perlu mempertahankan dan memperkuat upaya yang ada. Sebaliknya, sebagian besar wilayah lainnya memiliki prevalensi di atas rata-rata provinsi, termasuk Garut, Bandung, Kota Tasikmalaya, Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Cianjur, yang menandakan perlunya intervensi yang lebih masif dan terfokus, terutama pada wilayah dengan angka tertinggi. Kesenjangan ini mencerminkan tantangan ketimpangan dalam hal gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kondisi sosial ekonomi antarwilayah di Jawa Barat, yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis wilayah.

## CAPAIAN PREVALENSI STUNTING KABUPATEN KOTA TAHUN 2024



# REALISASI INVESTASI

- Pada tahun 2024, realisasi investasi di Jawa Barat mencapai Rp251 triliun, atau sekitar 14,7 persen dari total investasi nasional. Tingginya capaian ini ditopang oleh kematangan kawasan industri di wilayah barat, khususnya di Kabupaten Bekasi (28,6%), Karawang (27,3%), dan Bogor (9,12%), yang secara keseluruhan menyerap lebih dari 60 persen total investasi.
- Namun, dominasi investasi di wilayah barat dan tingginya proporsi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 59,5 persen, memicu risiko enclave economy. Kondisi ini ditandai oleh otomasi tinggi, rendahnya dampak terhadap UMKM dan IKM, serta minimnya penyerapan tenaga kerja luas, terutama pekerja tidak terampil. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung tidak inklusif dan memperlebar ketimpangan antarwilayah.
- Sementara itu, Jawa Barat bagian selatan hanya memperoleh 3,94 persen dari total investasi, menunjukkan kesenjangan distribusi. Bahkan Kawasan Rebana, yang direncanakan sebagai kawasan industri baru, baru mampu menyumbang sekitar 9,26 persen, jauh dari ekspektasi sebagai pusat pertumbuhan baru.



- Pembahasan investasi tidak dapat dilepaskan dari seberapa efisien proses produksi dalam memanfaatkan investasi yang ada dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Efisiensi produksi ditunjukkan oleh nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR), menggambarkan kebutuhan investasi untuk menghasilkan tambahan satu unit output. Indonesia tercatat memiliki rata-rata ICOR sebesar 6,5 dalam lima belas tahun terakhir dengan periode 2020-2022 dikecualikan untuk mengeliminasi dampak pandemi. Jika dibandingkan dengan ICOR negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (5,4), Filipina (4,1), Thailand (4,4), dan Vietnam (3,7), ICOR Indonesia termasuk kategori tinggi yang menunjukkan inefisiensi produksi. Rata-rata nilai ICOR Jawa Barat lima belas tahun terakhir adalah sebesar 4,7 (periode 2020-2022 dikecualikan untuk mengeliminasi dampak covid). Kondisi ICOR ini tidak mengalami perbaikan setiap tahunnya, melainkan berfluktuasi dengan trend yang meningkat, bahkan pada tahun 2024 ICOR Jawa Barat mencapai 5,0.

\*(ICOR Kab/Kota Masih mengumpulkan data PMTB)

# PERMASALAHAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT

## ASPEK GEOGRAFI

1. Risiko bencana masih relatif tinggi (114,15 poin) meski mengalami penurunan dengan kategori sedang
2. Kualitas lingkungan hidup relatif rendah (66,02 poin) akibat pencemaran sungai dan laut, pencemaran udara perkotaan, keterbatasan pengelolaan persampahan, dan berkurangnya kualitas tutupan lahan
3. Masih tingginya ketergantungan pembangkit listrik terhadap konsumsi bahan bakar fosil
4. Sistem pangan rentan terhadap perubahan faktor internal maupun eksternal
5. Belum optimalnya pengelolaan pesisir dan perikanan tangkap dalam batas wilayah laut 12 mil, termasuk potensi sumber daya ekonomi wilayah pesisir yang belum termanfaatkan secara optimal
6. Belum optimalnya pengembangan ekowisata terintegrasi

## PELAYANAN UMUM

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas

## ASPEK DEMOGRAFI

1. Laju pertumbuhan penduduk (1,13 persen lebih besar dari LPP Nasional) masih cukup tinggi dan kebutuhan pengendalian penduduk
2. Kompetensi angkatan kerja belum optimal dan risiko peningkatan rasio ketergantungan (43,12 persen) dari penduduk usia tua

## ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Pertumbuhan ekonomi belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal
2. Disparitas kualitas SDM dengan capaian IPM (74,92 tahun) yang relatif rendah dibandingkan nasional
3. Pemerataan dan kualitas infrastruktur belum optimal
4. Belum optimalnya upaya meningkatkan daya saing iklim investasi

## ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Daya beli masyarakat miskin yang rentan terhadap inflasi
2. Angka kemiskinan absolut masih tinggi (7,8% dengan jumlah 4,2 juta rumah tangga)
3. Tingkat pengangguran (6,75 persen) masih tinggi
4. Kesenjangan pendapatan (0,428 poin) wilayah perkotaan dan perdesaan dan antar-kelompok masyarakat
5. Kesejahteraan petani dan nelayan masih rendah
6. Masih ada keterbatasan masyarakat dalam mengakses pendidikan
7. Belum optimalnya layanan kesehatan masyarakat
8. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan nilai agama (76,47 poin)
9. Peran pemuda (61,1 poin) belum optimal meski jumlahnya terbanyak di Indonesia
10. Ketimpangan gender (0,482 poin) dan rendahnya perlindungan perempuan

# ISU KONTEKSTUAL PEMBANGUNAN

## KLHS RPJMD Jawa Barat 2025-2029



1. Belum meratanya distribusi dan kualitas dari akses dan sarana prasarana serta SDM pendidikan di segala jenjang;
2. Belum optimalnya perlindungan sosial yang tepat sasaran guna mewujudkan inklusivitas dan masyarakat yang adaptif;
3. Belum merata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pelayanan dalam penanganan dampak lingkungan dari persampahan, sanitasi, konektivitas publik, dan energi yang tidak ramah lingkungan;
4. Belum meratanya pelayanan, pengendalian pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan serta kurangnya SDM bidang kesehatan, baik secara kuantitas dan kualitas;
5. Belum optimalnya ekonomi daerah, akses permodalan, pembinaan UMKM, pariwisata, serta pengembangan ekonomi biru dan hijau berbasis keunggulan wilayah;
6. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim, serta upaya penurunan gas rumah kaca;
7. Belum optimalnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tata ruang, tata kelola pemerintahan, serta kerja sama antar pihak termasuk masyarakat adat;
8. Penurunan kualitas dan daya dukung lahan akibat alih fungsi lahan, khususnya untuk ketersediaan pangan dan air;
9. Belum optimalnya pengelolaan DAS dan rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati darat dan laut.



# KONFIGURASI SEKTOR EKONOMI JAWA BARAT 2025-2029



## Pertanian, Kehutanan, Perikanan

- Kontribusi terhadap PDRB: 8,7%
- Produksi padi mencapai 12,7 juta ton (2029).
- Sektor Perikanan Tumbuh 9,08% (2029).

## Industri Pengolahan

- Share terhadap PDRB: 39,7%.
- Kontributor utama: alat angkutan, makanan-minuman, dan tekstil.
- Didorong oleh hilirisasi.

## Konstruksi

- Kontribusi terhadap PDRB: 9,8%
- Konstruksi di kawasan industri baru.
- Pembangunan infrastruktur wilayah (jalan, pelabuhan, sumber daya air, sekolah, dsb)
- Perumahan dan kawasan permukiman.

## Perdagangan Besar dan Eceran

- Kontribusi terhadap PDRB: 14,9%
- Pusat perdagangan di kawasan perkotaan
- Ekspansi perdagangan luar negeri dan antar daerah.

## Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

- Kontribusi terhadap PDRB: 4,17%
- Kunjungan wisatawan mencapai 76 juta orang (2029).

2025

1,88

4,36

6,60

4,58

7,87

2029

4,64

6,27

10,29

6,96

12,46



## PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT

DALAM Mendukung Pencapaian  
TARGET NASIONAL 8%

5,10 → 7,95  
(%, y-o-y)

Tahun 2025 → 2029

2029

7,65

8,93

9,74

8,78

2025

5,04

5,46

6,24

6,77

## Konsumsi Rumah Tangga

- Kontribusi terhadap PDRB: 69,8%
- Inflasi terkendali: 2,5 ± 1%.
- Kesejahteraan meningkat: tingkat kemiskinan menjadi 2,86%.(Th 2029)

## Konsumsi Pemerintah

- Kontribusi terhadap PDRB: 5%.
- Pertumbuhan meningkat seiring tingginya intervensi pemerintah dalam menstimulus perekonomian dan pembangunan infrastruktur.

## PMTB/Investasi

- Kontribusi terhadap PDRB: 25%
- Total realisasi investasi tahun 2025-2029 Rp 2.277 T (15% investasi nasional).
- ICOR Jawa Barat: 3,4 (2029).

## Ekspor Luar Negeri

- Kontribusi PDRB: 21%
- Perluasan pasar tujuan ekspor, dan fasilitasi ekspor produk hilir.

2

# JAWA BARAT DALAM RPJMN 2025-2029

## SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL

### 1 Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju Negara Maju

● Pertumbuhan Ekonomi	2025	5,3%	2029	8%
● GNI per Kapita	2025	4.870 USD	2029	8.000 USD
● Kontribusi PDB Maritim	2025	7,9%	2029	9,1%
● Kontribusi PDB Manufaktur	2025	20,8%	2029	21,9%

### 2 Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

● Global Power Index	2025	33	2029	29
----------------------	------	----	------	----

### 3 Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan berkurang

● Tingkat Kemiskinan	2025	7-8%	2029	4,5-5%
● Rasio Gini	2025	0,378-0,382%	2029	0,372-0,375%
● Kontribusi PDRB KTI	2025	21,4%	2029	22,4%

### 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

● Indeks Modal Manusia	2025	0,56	2029	0,59
------------------------	------	------	------	------

### 5 Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

● Penurunan intensitas emisi GRK	2025	35,53	2029	45,17
● IKLH	2025	76,49	2029	77,2

## PRIORITAS NASIONAL

- 1 PN 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
- 2 PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- 3 PN 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
- 4 PN 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
- 5 PN 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
- 6 PN 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
- 7 PN 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
- 8 PN 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

# TARGET INDIKATOR MAKRO



Dalam rangka mendukung tema Pulau Jawa, yaitu “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan” dan arah kebijakan pembangunan wilayah, Provinsi Jawa Barat perlu mendorong upaya transformatif utamanya pada sektor prioritas:

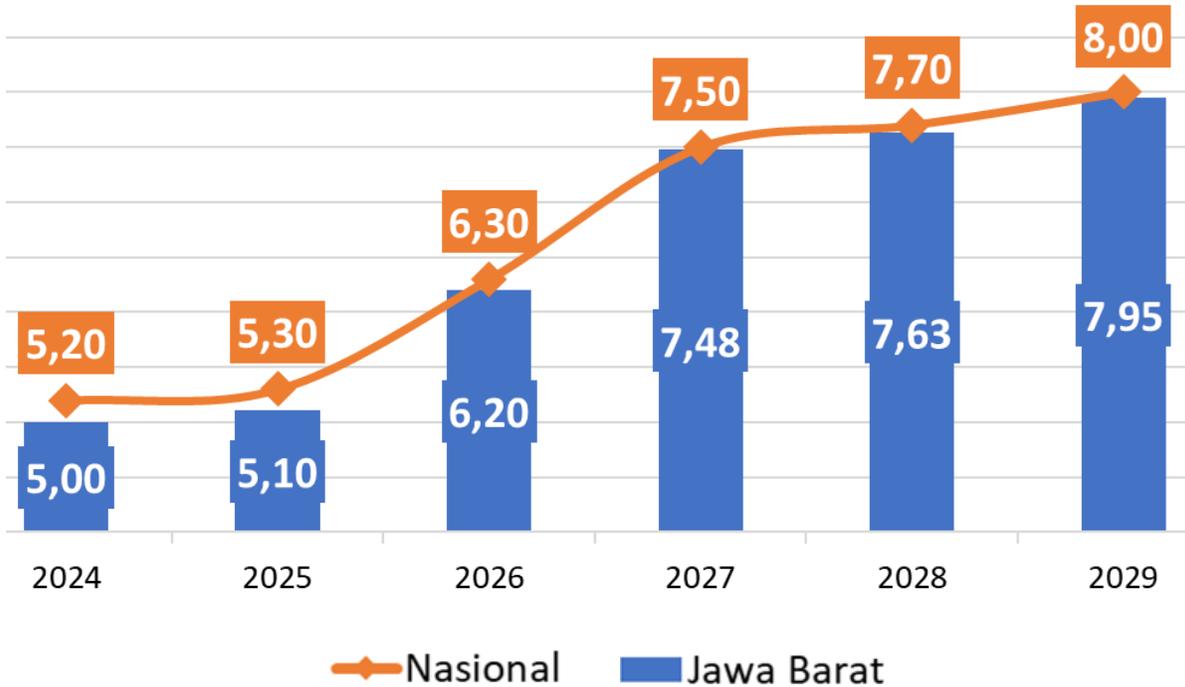
1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2) Industri Pengolahan, dan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,57	0,58	0,58	0,59	0,6	0,6
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02	4,78 - 5,44	3,89 - 4,66	2,86 - 3,86	2,57 - 3,52
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,75	6,42 - 6,99	6,31 - 6,66	6,05 - 6,49	6,00 - 6,53	5,94 - 6,56	5,86 - 6,27
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,95	4,96 - 5,37	5,10 - 6,20	5,23 - 7,48	5,27 - 7,63	5,44 - 7,95	5,49 - 6,06
5	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah / Kapita	56,08	57,41 - 59,60	63,65 - 66,0	68,22 - 71,6	73,27 - 77,8	78,85 - 84,9	85,36 - 91,57
6	Rasio Gini	Poin	0,428	0,383 - 0,390	0,381 - 0,420	0,381 - 0,420	0,380 - 0,419	0,381 - 0,383	0,379 - 0,383
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	6,61	6,97	7,98	8,76	8,95	12,68
8	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	12,82	12,7	12,6	12,5	12,5	12,3	12,2
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	66,02	64,06	64,31	64,56	64,82	65,07	65,32

# TRAYEKTORI PEMBANGUNAN EKONOMI JAWA BARAT 2025-2029



## TRAYEKTORI PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN JAWA BARAT



Sumber: Exercise Bappenas, Desember 2024.

**LPE (% c-to-c)**  
**4,95 → 7,95**  
 (2024) (2029)

**PDRB per KAPITA (Rp Juta)**  
**56,08 → 84,9**  
 (2024) (2029)

**REALISASI INVESTASI (Rp Triliun)**  
**251,1 → 531,6**  
 (2024) (2029)

## HIGHLIGHT INTERVENSI DI JAWA BARAT DALAM RPJMN 2025-2029

- 1 Ekosistem dan Infrastruktur Pendukung Industri
- 2 Swasembada Pangan
- 3 Pusat Pertumbuhan Baru
- 4 Ekosistem dan Destinasi Pariwisata

## LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI DALAM MENDUKUNG LPE 8%



### Sektor Prioritas :

- KAW. PERKOTAAN PRIORITAS
- KORIDOR INDUSTRI
- KAW. PARIWISATA DAN EKRAF
- DAERAH AFIRMASI
- DAERAH PENGEMBANGAN PERTANIAN
- KAW. HILIRISASI BLUE ECONOMY
- PENYANGGA KETAHANAN ENERGI DAN AIR
- KOR. MULTI INFRASTRUKTUR

3

# JAWA BARAT DALAM RPJPD 2025-2045

# SASARAN VISI RPJPD PROVINSI JAWA BARAT TAHAP I (2025-2029)



## 1 Pendapatan per kapita meningkat

INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1 PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah)	57,41 - 59,60	78,85 - 84,9
2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (poin)	61,3	64,61
3 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,15-41,38	37,6-41,58

## 3 Kepemimpinan daerah di dunia Internasional meningkat

INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
8 Indeks Daya Saing Daerah (poin)*	3,9	4,22

## 5 Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
10 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	8,95
11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)**	64,06	65,07

## 2 Kemiskinan dan ketimpangan menurun

INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
4 Persentase Penduduk Miskin (%)	5,85 - 6,46	2,86 - 3,86
5 Rasio Gini (indeks)	0,383 - 0,390	0,379 - 0,418
6 Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,72	12,3
7 Pertumbuhan Ekonomi (%)**	4,96-5,37	5,44 - 7,95

## 4 Daya saing sumber daya manusia meningkat

INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
9 Indeks Modal Manusia (poin)	0,57	0,6

# TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPD 2025-2045

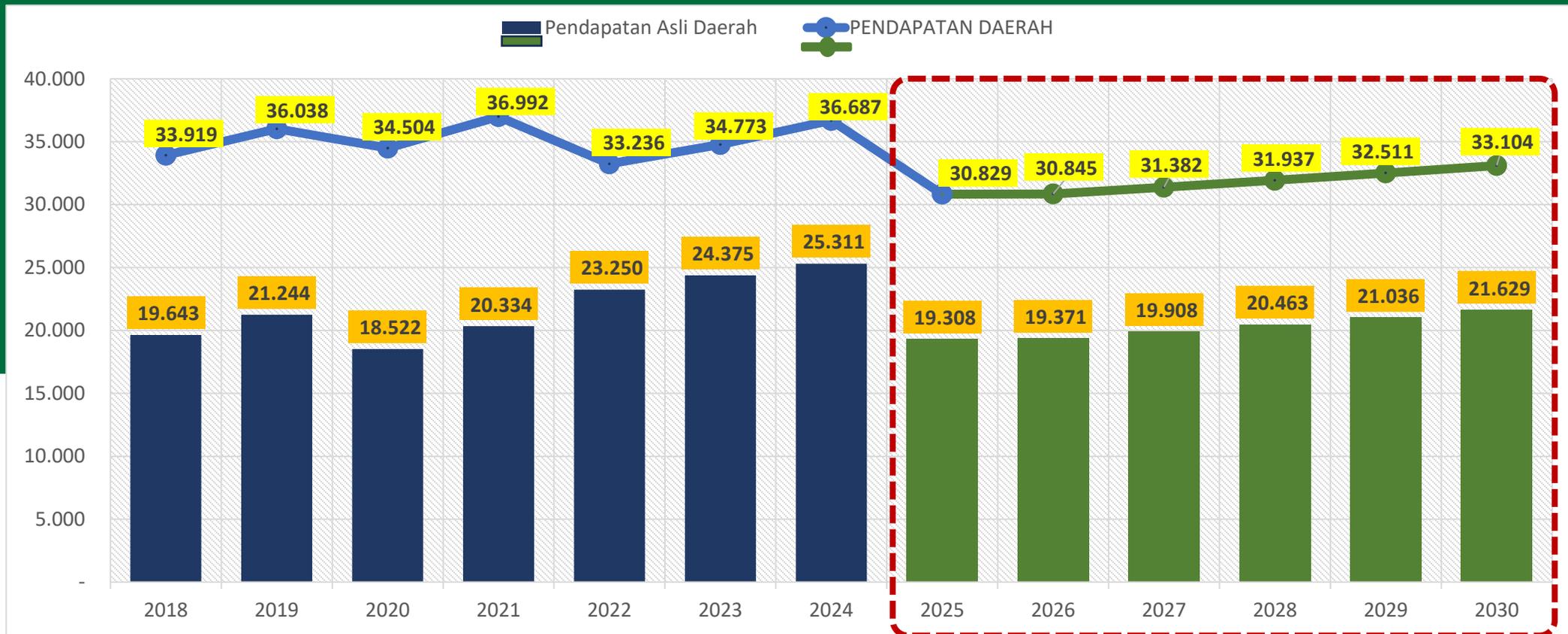


4

# KAPASITAS FISKAL JAWA BARAT



# PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

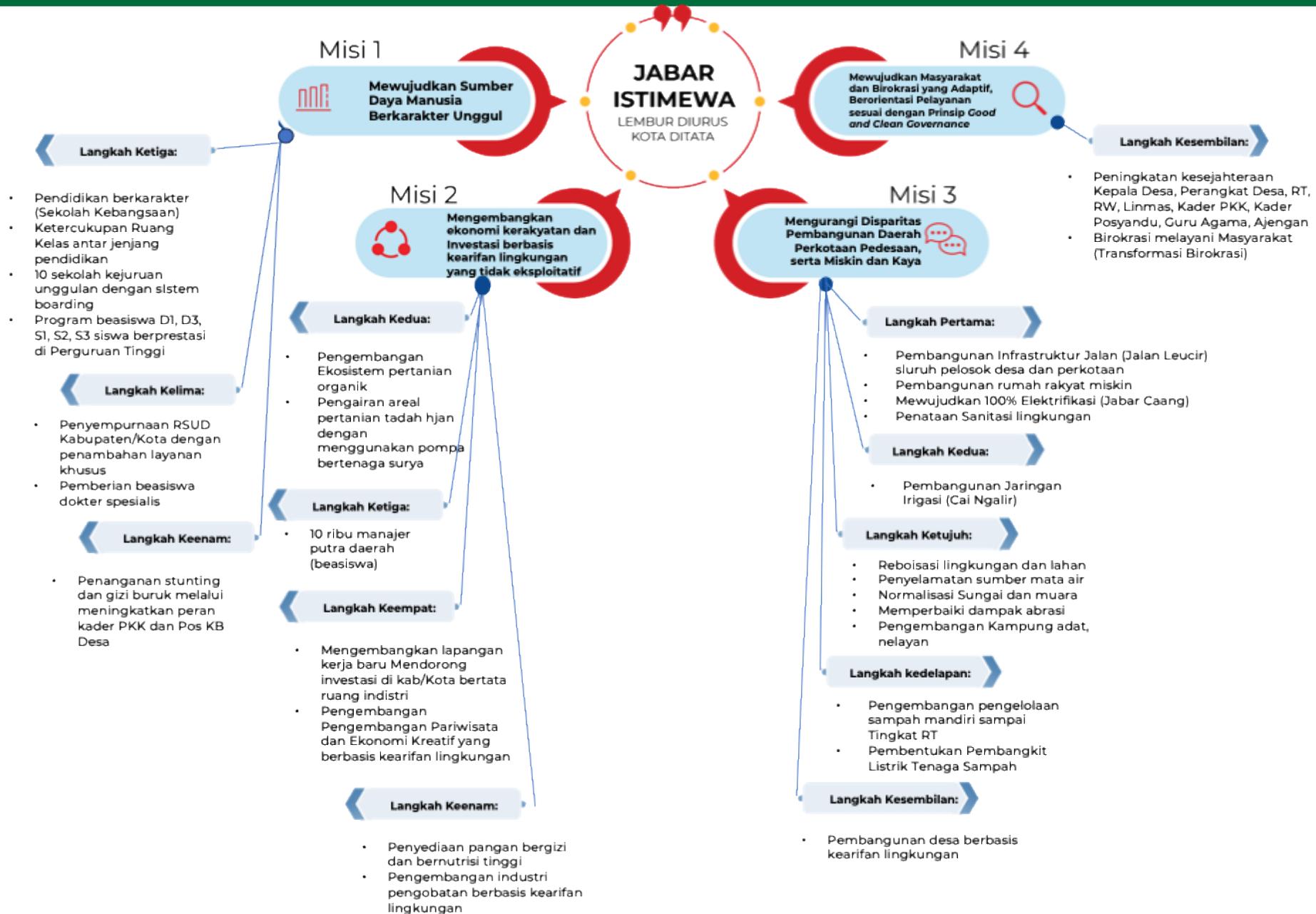


- Pendapatan Provinsi 2025 s.d. 2029 diproyeksikan meningkat

4

# VISI DAN MISI JAWA BARAT 2025-2029

# VISI, MISI, DAN 9 LANGKAH MEMBANGUN JAWA BARAT



# SANDINGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, PROGRAM PRIORITAS, DAN 9 LANGKAH MEMBANGUN JAWA BARAT



## PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
4. Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*

**MISI** Gubernur dituangkan menjadi **PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH** dalam RPJMD 2025-2029

## 9 LANGKAH MEMBANGUN JAWA BARAT

1. **LANGKAH PERTAMA**  
Pembangunan infrastruktur **jalan** di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan **rumah rakyat miskin**, mewujudkan Jabar Canggih melalui **100% elektrifikasi** masyarakat, serta penataan **sanitasi lingkungan** dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (Open Defecation Free/bebas buang air besar sembarangan).
2. **LANGKAH KEDUA**  
Pembangunan jaringan **irigasi** serta pengembangan ekosistem **pertanian organik**, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengaliran areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan **pompa** bertenaga surya.
3. **LANGKAH KETIGA**  
Pengembangan **Pendidikan Berkarakter**, dengan didukung ketercukupan **ruang kelas**, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan **10 sekolah kejuruan unggulan** dengan sistem boarding, berkapasitas 1000 siswa per sekolah, dengan kurikulum **link and match** dengan dunia kerja, sehingga membentuk **manager-manager baru** di Jawa Barat, serta pengembangan **program beasiswa** D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.
4. **LANGKAH KEEMPAT**  
Mengembangkan **lapangan kerja** baru, dengan mendorong **investasi** di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta **pariwisata** dan **ekonomi kreatif** yang berbasis kearifan lingkungan.
5. **LANGKAH KELIMA**  
Penyempurnaan **RSUD Kabupaten/Kota** dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian **beasiswa dokter spesialis**, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat.
6. **LANGKAH KEENAM**  
Penanganan **stunting** dan **gizi buruk** dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan **industri pengobatan** berbasis kearifan lingkungan.
7. **LANGKAH KETUJUH**  
Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui **reboisasi hutan** dan lahan, **penyelamatan sumber mata air**, **normalisasi** sungai dan muara, memperbaiki **dampak abrasi**, serta pengembangan **kampung adat** berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan.
8. **LANGKAH KEDELAPAN**  
Pengembangan **pengelolaan sampah mandiri** sampai dengan tingkat RT serta pembentukan **Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS)**.
9. **LANGKAH KESEMBILAN**  
Peningkatan **kesejahteraan** Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan **desa berbasis kearifan lingkungan** dan **transformasi birokrasi berdampak**.

## PROGRAM PRIORITAS

1. Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
2. Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional
3. Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup
4. Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama
5. Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Keterteraman dan Ketertiban Umum
6. Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi
7. Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat
8. Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
9. Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
10. Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan
11. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan
12. Program Peningkatan dan pemerataan investasi
13. Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah
14. Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD
15. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan
16. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
17. Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan
18. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim
19. Program Pengurangan Risiko Bencana
20. Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)
21. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah
22. Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan
23. Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional

# TAHAPAN PEMBANGUNAN 2025-2029



5

# PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF 2025-2029

# PROYEKSI BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029



**2025**

**BELANJA DAERAH**  
Rp30.905.991.076.123

**BELANJA OPERASI**  
Rp19.417.322.246.664

1. Belanja Pegawai  
Rp9.113.313.015.398
2. Belanja Barang dan Jasa  
Rp7.118.081.496.712
3. Belanja Bunga  
-
4. Belanja Subsidi  
Rp159.341.421.779
5. Belanja Hibah  
Rp2.992.519.562.775
6. Belanja bantuan Sosial  
Rp34.066.750.000

**BELANJA MODAL**  
Rp4.176.567.377.057

**BELANJA TIDAK TERDUGA**  
Rp635.114.586.858

**BELANJA TRANSFER**  
Rp6.676.986.865.544

**2026**

**BELANJA DAERAH**  
Rp29.877.737.538.533

**BELANJA OPERASI**  
Rp19.685.934.572.481

1. Belanja Pegawai  
Rp9.250.012.710.629
2. Belanja Barang dan Jasa  
Rp7.123.922.320.268
3. Belanja Bunga  
-
4. Belanja Subsidi  
Rp159.341.421.779
5. Belanja Hibah  
Rp3.037.396.530.333
6. Belanja bantuan Sosial  
Rp115.261.589.473

**BELANJA MODAL**  
Rp3.256.060.310.164

**BELANJA TIDAK TERDUGA**  
Rp150.000.000.000

**BELANJA TRANSFER**  
Rp6.785.742.655.888

**2027**

**BELANJA DAERAH**  
Rp30.314.786.898.038

**BELANJA OPERASI**  
Rp19.911.503.560.793

1. Belanja Pegawai  
Rp9.388.762.901.288
2. Belanja Barang dan Jasa  
Rp7.140.509.378.543
3. Belanja Bunga  
-
4. Belanja Subsidi  
Rp159.341.421.779
5. Belanja Hibah  
Rp3.102.897.919.322
6. Belanja bantuan Sosial  
Rp119.991.939.860

**BELANJA MODAL**  
Rp3.242.751.779.572

**BELANJA TIDAK TERDUGA**  
Rp150.000.000.000

**BELANJA TRANSFER**  
Rp7.010.531.557.674

**2028**

**BELANJA DAERAH**  
Rp30.869.903.585.448

**BELANJA OPERASI**  
Rp20.209.049.875.732

1. Belanja Pegawai  
Rp9.529.594.344.807
2. Belanja Barang dan Jasa  
Rp7.224.804.721.302
3. Belanja Bunga  
-
4. Belanja Subsidi  
Rp159.341.421.779
5. Belanja Hibah  
Rp3.170.587.097.596
6. Belanja bantuan Sosial  
Rp124.722.290.248

**BELANJA MODAL**  
Rp3.323.907.743.663

**BELANJA TIDAK TERDUGA**  
Rp150.000.000.000

**BELANJA TRANSFER**  
Rp7.186.945.966.053

**2029**

**BELANJA DAERAH**  
Rp32.443.764.929.054

**BELANJA OPERASI**  
Rp21.637.560.605.232

1. Belanja Pegawai  
Rp9.672.538.259.980
2. Belanja Barang dan Jasa  
Rp7.232.952.006.968
3. Belanja Bunga  
-
4. Belanja Subsidi  
Rp159.341.421.779
5. Belanja Hibah  
Rp4.443.276.275.870
6. Belanja bantuan Sosial  
Rp129.452.640.636

**BELANJA MODAL**  
Rp3.291.185.590.778

**BELANJA TIDAK TERDUGA**  
Rp150.000.000.000

**BELANJA TRANSFER**  
Rp7.365.018.733.044

**2030**

**BELANJA DAERAH**  
Rp32.637.075.435.549

**BELANJA OPERASI**  
Rp20.906.557.358.128

1. Belanja Pegawai  
Rp9.817.626.333.879
2. Belanja Barang dan Jasa  
Rp7.489.441.157.303
3. Belanja Bunga  
-
4. Belanja Subsidi  
Rp159.341.421.779
5. Belanja Hibah  
Rp3.305.965.454.143
6. Belanja bantuan Sosial  
Rp134.182.991.023

**BELANJA MODAL**  
Rp3.985.734.798.043

**BELANJA TIDAK TERDUGA**  
Rp150.000.000.000

**BELANJA TRANSFER**  
Rp7.594.783.279.379

# PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

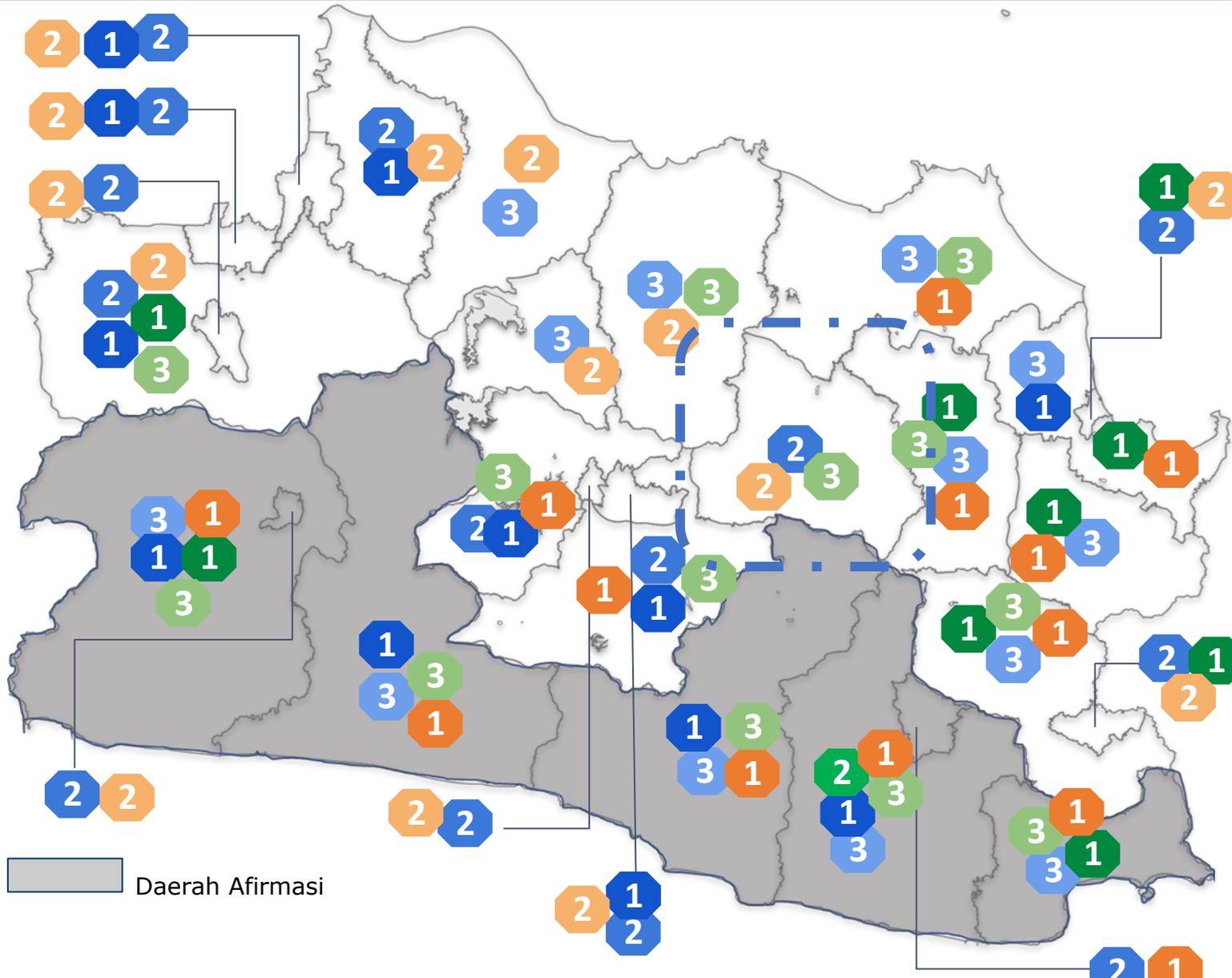


2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>PEMBIAYAAN</b> Rp76.581.888.192	<b>PEMBIAYAAN</b> Rp(966.806.035.144)	<b>PEMBIAYAAN</b> Rp(1.066.806.035.144)	<b>PEMBIAYAAN</b> Rp(1.066.806.035.144)	<b>PEMBIAYAAN</b> Rp(66.806.035.144)	<b>PEMBIAYAAN</b> Rp(466.806.035.144)
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b> Rp693.387.923.336	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b> Rp -	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b> Rp -	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b> Rp -	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b> Rp600.000.000.000	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b> Rp351.673.262.057
1. SiLPA Rp693.387.923.336 2. Pencairan Dana Cadangan Rp-	1. SiLPA Rp - 2. Pencairan Dana Cadangan Rp-	1. SiLPA Rp - 2. Pencairan Dana Cadangan Rp-	1. SiLPA Rp - 2. Pencairan Dana Cadangan Rp-	1. SiLPA Rp600.000.000.000 2. Pencairan Dana Cadangan Rp-	1. SiLPA Rp- 2. Pencairan Dana Cadangan Rp-
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b> Rp616.806.035.144	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b> Rp966.806.035.144	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b> Rp1.066.806.035.144	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b> Rp1.066.806.035.144	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b> Rp666.806.035.144	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b> Rp666.806.035.144
1. Cicilan Pokok Hutang Rp566.806.035.144 2. Penyertaan Modal Daerah Rp50.000.000.000 3. Pembentukan Dana Cadangan Rp-	1. Cicilan Pokok Hutang Rp566.806.035.144 2. Penyertaan Modal Daerah Rp400.000.000.000 3. Pembentukan Dana Cadangan Rp-	1. Cicilan Pokok Hutang Rp566.806.035.144 2. Penyertaan Modal Daerah Rp300.000.000.000 3. Pembentukan Dana Cadangan Rp200.000.000.000	1. Cicilan Pokok Hutang Rp566.806.035.144 2. Penyertaan Modal Daerah Rp100.000.000.000 3. Pembentukan Dana Cadangan Rp400.000.000.000	1. Cicilan Pokok Hutang Rp566.806.035.144 2. Penyertaan Modal Daerah Rp100.000.000.000 3. Pembentukan Dana Cadangan Rp-	1. Cicilan Pokok Hutang Rp366.806.035.144 2. Penyertaan Modal Daerah Rp100.000.000.000 3. Pembentukan Dana Cadangan Rp-

# 6 | ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA 2025-2029



## INDIKASI PROGRAM DAN LOKASI PRIORITAS TAHUN 2025-2029



### PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN

- 1 Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan (USB dan RKB)
- 2 Pendidikan STEAM bemuatan lokal Kreatif
- 3 Peningkatan pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

### PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN

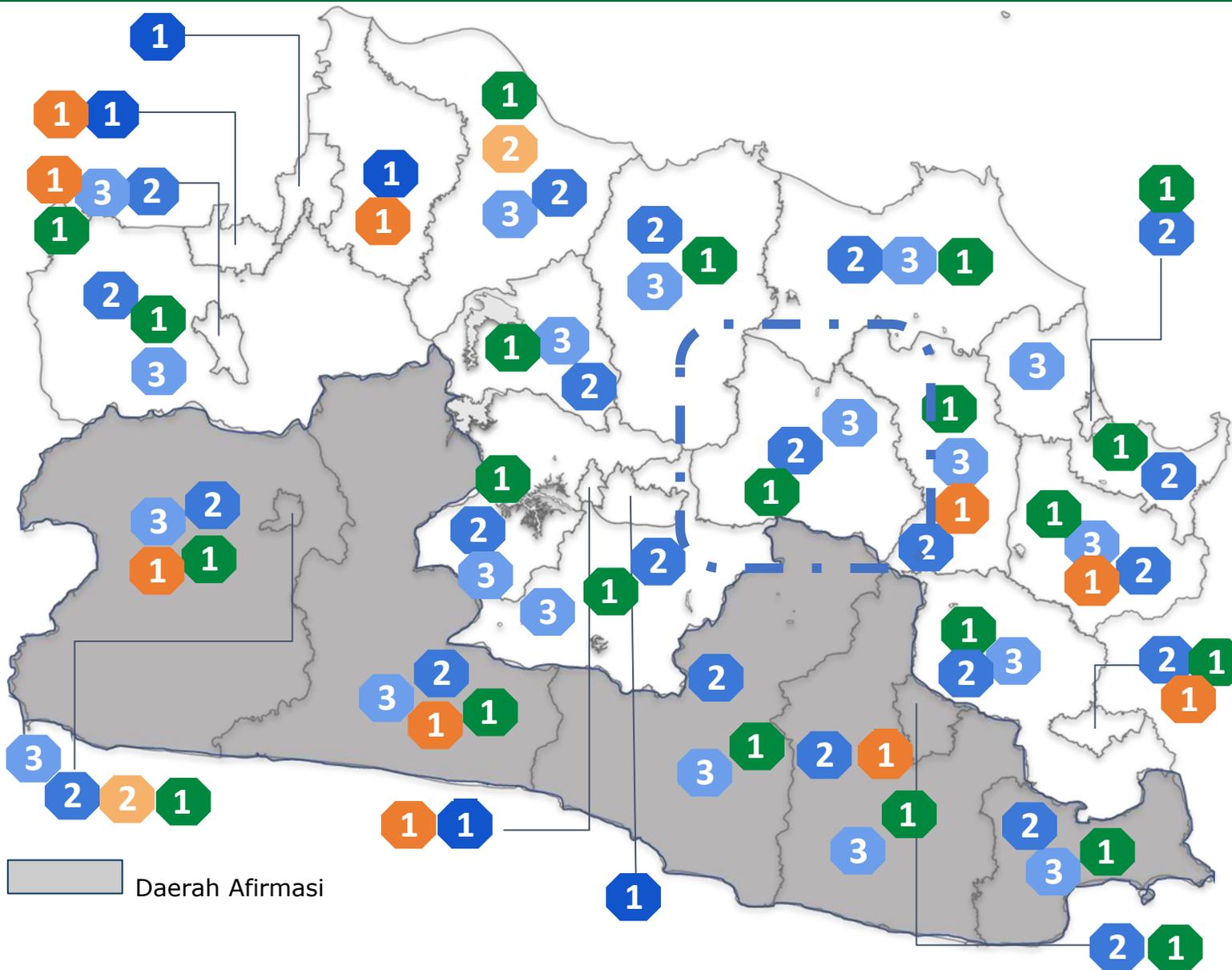
- 1 Peningkatan dan pemerataan infrastruktur kesehatan
- 2 Peningkatan Universal Health Coverage (UHC)
- 3 Peningkatan sarana & prasarana kesehatan

### PENINGKATAN STANDAR HIDUP LAYAK

- 1 Peningkatan, pendampingan dan permodalan usaha
- 2 Peningkatan pemberdayaan ekonomi kreatif



## INDIKASI PROGRAM DAN LOKASI PRIORITAS TAHUN 2025-2029



### MENINGKATKAN PENDAPATAN

- 1 Peningkatan pemberdayaan ekonomi kreatif
- 2 Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan pendampingan
- 3 Peningkatan dan penguatan peran BUMDes

### MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN

- 1 Penerapan Program Kartu Miskin

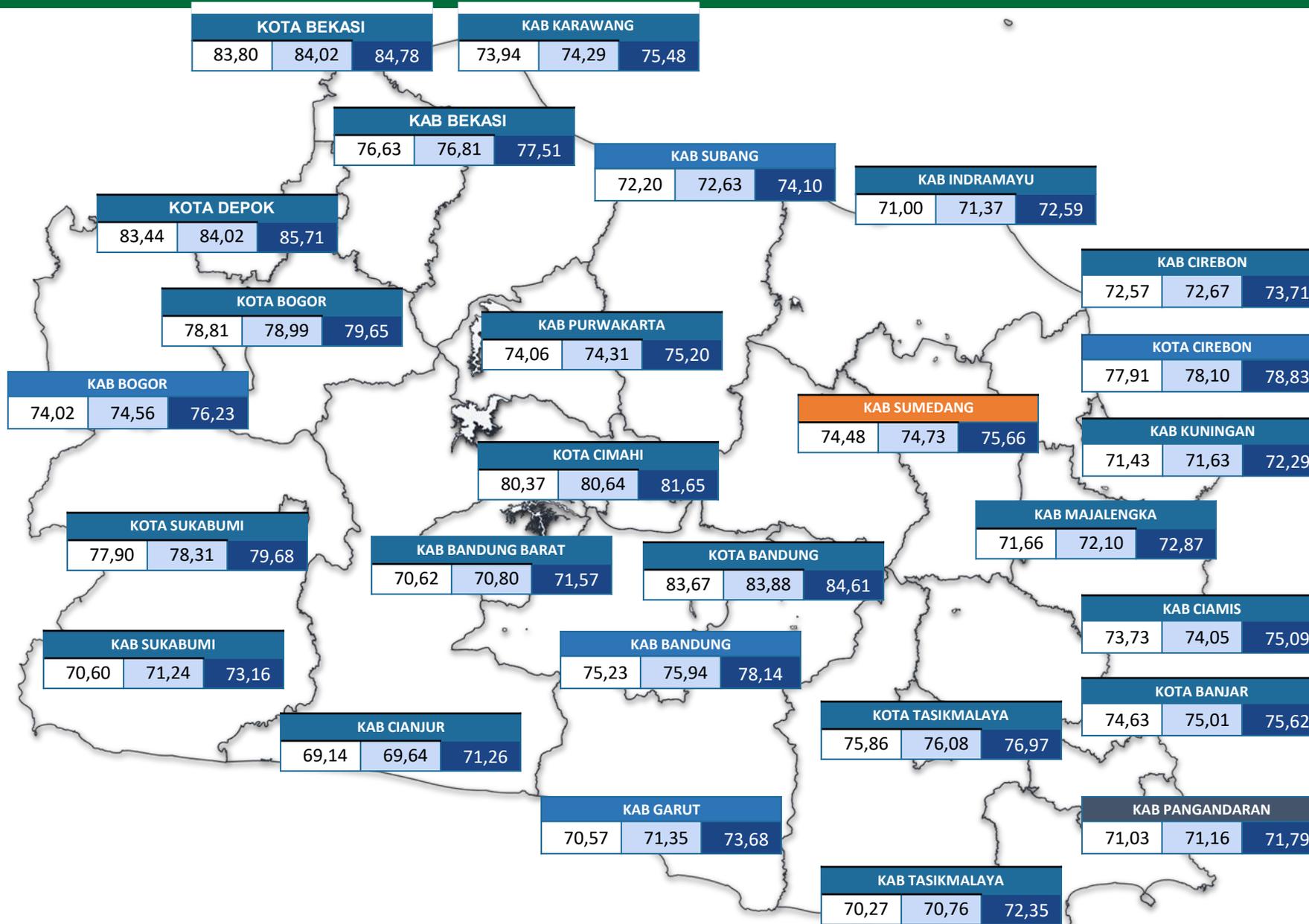
### MENGURANGI KANTONG KEMISKINAN

- 1 Penataan kawasan kumuh (sanitasi, air minum, air bersih)
- 2 Percepatan Open Defecation Free (ODF)

### MENGUATKAN KELEMBAGAAN

- Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan

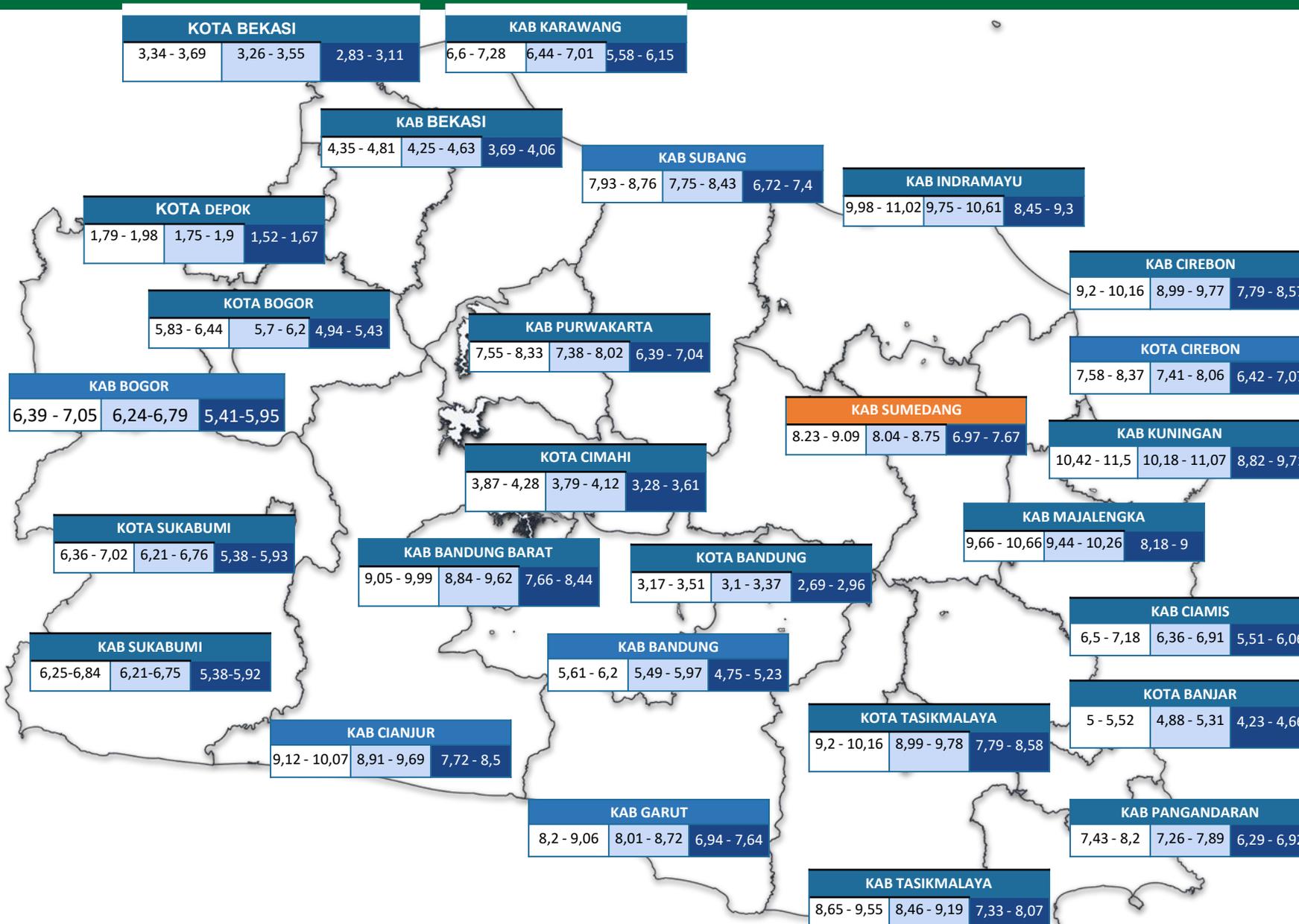
# TARGET INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KAB / KOTA



## KETERANGAN

- TARGET 2025
- TARGET 2026
- TARGET 2029

# TARGET PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KAB / KOTA



## KETERANGAN

- TARGET 2025
- TARGET 2026
- TARGET 2029

# INDIKATOR MAKRO EKONOMI 2025-2029



## Kabupaten Sumedang

### Indikator Sasaran Visi

No.	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PDRB per Kapita (Rp. Juta/Kapita)	39.55 - 39.91	44.3 - 45.27	47.7 - 49.45	51.33 - 54.13	55.18 - 59.33	59.5 - 65.71
2	Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	19.62	19.71	19.8	19.89	19.99	20.09
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8.23 - 9.09	7.64 - 8.34	6.62 - 7.48	5.39 - 6.46	3.96 - 5.35	3.59 - 4.92
4	Rasio Gini	0.352 - 0.359	0.342 - 0.403	0.343 - 0.424	0.346 - 0.397	0.353 - 0.379	0.357 - 0.38
5	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	1.64	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.79 - 5.20	4.77 - 6.03	4.84 - 7.42	4.88 - 7.57	5.04 - 7.89	5.08 - 5.61
7	Indeks Pembangunan Manusia	74.48	74.73	75.00	75.31	75.66	76.02
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO <sub>2</sub> Eq/Miliar)	6.05	6.44	6.87	7.42	7.96	8.40
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.25	-	-	-	67.26	-



## Kabupaten Sumedang

### Indikator Utama Pembangunan : Transformasi Sosial

No.	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75.42	75.62	75.81	76	76.2	76.39
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun	26	24	21	19	18	16
3	Prevalensi Stunting pada Balita (%)	12.58	11.82	11.11	10.45	9.82	9.23
4	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (%)	91	91	91	91	91	91
5	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (%)	91	91	91	91	91	91
6	Cakupan Kepesertaan JKN (%)	90.43	90.86	91.28	91.71	92.14	92.57
7	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.09	13.13	13.17	13.21	13.25	13.29
8	Tingkat Kemiskinan (%)	8.23 - 9.09	7.64 - 8.34	6.62 - 7.48	5.39 - 6.46	3.96 - 5.35	3.59 - 4.92



## Kabupaten Sumedang

### Indikator Utama Pembangunan : Transformasi Ekonomi

No.	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	19.62	19.71	19.8	19.89	19.99	20.09
2	Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5.24	5.34	5.45	5.56	5.68	5.8
3	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3.74	3.92	4.11	4.31	4.52	4.74
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.13 - 6.68	5.89 - 6.44	5.88 - 6.43	5.86 - 6.4	5.84 - 6.38	5.8 - 6.34
5	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	49.60	51.19	51.87	52.63	53.41	54.21
6	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	23.51	23.59	23.67	23.75	23.84	23.92
7	RT dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	63.22	64.66	66.10	67.54	68.96	70,90
8	Persentase Desa Mandiri (%)	8.52	-	-	-	11.85	11.85



## Kabupaten Sumedang

### Indikator Utama Pembangunan : Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi

No.	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.25	-	-	-	67.26	-
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Persen)	7.02	12.40	17.77	23.15	28.52	33.90
3	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Persen)	2.63	2.98	3.38	8.27	22.70	23.96
4	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (Persen)	76.77	80.34	84.07	87.97	97.36	100.00
5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)	5.01	4.83	4.61	4.36	4.08	3.80
6	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	2.26	2.61	2.95	3.31	3.66	4.02
7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Persen)	32.55	35.92	39.29	42.67	46.04	49.41
8	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2Eq)	456.726,86	501,743.13	549,988.17	606,325.34	672,001.06	743,714.08



# TERIMA KASIH

*“Sukses Perencanaan Sukses Implementasi”*

Jalan Ir. H. Juanda No.287, Dago, Coblong,  
Kota Bandung, Jawa Barat | 40135

Telp : (022) 25 16065 | Fax (022) 2510731  
Email : [public@bappeda.jabarprov.go.id](mailto:public@bappeda.jabarprov.go.id)

 Bappeda Jabar  [bappedajabar](https://twitter.com/bappedajabar)  [bappedajabar](https://www.instagram.com/bappedajabar)  Bappeda Provinsi Jawa Barat

[bappeda.jabarprov.go.id](http://bappeda.jabarprov.go.id)